



MAKNA BUDAYA *TO CIUNG MACCAE RI LUWU* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Raden Ulandari Tamrin, Lince Bulutoding, Muhammad Sapril Sardi Juardi, Raodahtul Jannah

UIN Alauddin Makassar

Surel: radenulan.18@gmail.com , lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id ,
sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id, raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id,

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 2
Halaman 174-193
Samata, Desember 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
2 Agustus 2021

Tanggal Diterima:
11 Oktober 2021

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pihak pengelola keuangan daerah memaknai budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dan untuk mengetahui penerapan budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu dan memahami sudut pandang manusia terkait pengelolaan keuangan daerah. Melakukan penyandingan kearifan lokal atau unsur budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut karena pihak pengelola keuangan daerah telah memaknai dan menerapkan budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* yakni Nilai *adele*, *lempu*, dan *getteng* dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Untuk selanjutnya BPKD Kabupaten Luwu diharapkan lebih meningkatkan pemahamannya terhadap budaya di kerajaan luwu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui arti dari budaya tersebut tetapi lebih memaknai secara mendalam makna yang terkandung didalam budaya tersebut.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Daerah, To Ciung Maccae Ri Luwu, adele(adil), lempu (jujur), getteng(teguh).*

The purpose of this research is to find out to what extent the local financial managers interpret the To Ciung Maccae Ri Luwu culture and to find out the application of the To Ciung Maccae Ri Luwu culture in the regional financial management of Luwu Regency. This research is a qualitative research with an ethnographic approach that is used to examine human behavior related to the development of communication technology in certain social and cultural settings and understand the human point of view related to regional financial management. Pairing local wisdom or cultural elements of To Ciung Maccae Ri Luwu in regional financial management. The results of the study indicate that the regional financial management of Luwu Regency can be said to be good. This is because the regional financial management has interpreted and implemented the To Ciung Maccae Ri Luwu culture, namely the values of adele, lempu, and getteng in the process of regional financial management. In the future, the Luwu Regency BPKD is expected to further improve its understanding of the culture in the Luwu kingdom and apply it in daily life. Not just knowing the meaning of the culture, but more deeply interpreting the meanings contained in the culture.

Keywords: *Regional Financial Management, To Ciung Maccae Ri Luwu, adele (fair), lempu (honest), getteng (tough).*

Copyright: Thamrin, Raden Ulandari., Lince Bulutoding., Muhammad Sapril Sardi Juardi., Raodahtul Jannah., Puspita Hardianti Anwar. (2021). Makna Budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (174-193). doi 10.24252/jiap.v7i2.26849

PENDAHULUAN

Wilayah negara Republik Indonesia yang sangat luas dibagi dalam beberapa daerah provinsi dan provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Masing-masing daerah tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah sesuai dengan hak otonominya. Otonomi daerah di Indonesia merupakan solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pemerintahan (Nurhasanah, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Yatminiwati, 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang *et al.*, 2016). Dalam hal ini Pengelola keuangan daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap daerah sendiri memiliki adat istiadat dan nilai budaya tersendiri, hal ini berdasarkan karena wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, bahasa, etnis dan budaya sehingga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Dalam kehidupan masyarakat yang multietnis, kemajemukan tidak saja menyiratkan adanya perbedaan-perbedaan, tetapi juga di dalamnya mengandung interaksi timbal-balik antar pemerintah dengan masyarakatnya. Pada kondisi masyarakat seperti itu, masalah yang biasanya timbul adalah sulitnya mencapai kesepakatan dalam meletakkan landasan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai, hal ini berkaitan dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya dampak globalisasi yang dapat berakibat negatif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan dalam lingkup pemerintahan itu sendiri (Nurhasanah, 2017).

Tampak bahwa lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat mengakibatkan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya yang negatif sehingga terjadi pengikisan nilai budaya yang positif. Pentingnya kearifan lokal sebagai dasar pendidikan karakter, karena memang pada dasarnya merupakan kebenaran yang telah mentradisi dalam satu daerah. Kearifan lokal secara bersamaan merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dengan berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada. Sehingga inilah yang menyebabkan begitu berartinya kearifan lokal tersebut (Ima, 2015).

Nilai budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Nilai budaya sendiri lebih mengacu pada apa atau sesuatu oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga (Koentjaraningrat, 1987:85). Dengan kata lain, nilai budaya itu berasal dari pandangan hidup masyarakat. Nilai budaya adalah unsur-unsur gagasan atau ide, adat istiadat dan perilaku yang menjadi pedoman hidup masyarakat setempat. Nilai budaya yang senantiasa dijaga oleh masyarakat dalam bertingkah, baik terhadap diri sendiri maupun sesama masyarakat.

Kabupaten Luwu merupakan daerah yang terletak diujung utara Sulawesi Selatan. Selain terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah juga memiliki torehan sejarah yang menarik. Kitab *I Lagaligo* merupakan teks sastra peninggalan Kerajaan Luwu dan masih terpelihara keasliannya yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Luwu memiliki tradisi intelektual. Selain kitab *I Lagaligo*, beberapa peninggalan lainnya mempertegas kebesaran Luwu, seperti bangunan kerajaan, batu nisan dan masjid. Dalam hal ini juga terdapat beberapa nilai local dari Kerajaan Luwu (*Sawerigading*) masih dipegang oleh sebagian pemangku adat. Seperti nilai *To Ciung Maccae Ri Luwu* dimana nilai yang di ajarkan yaitu *adele'* (adil), *lempu'* (jujur) dan *getteng*. Namun seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin meningkat, budaya asing yang menghegemoni mengakibatkan lunturnya nilai budaya tersebut. Proses ini berlangsung tanpa disadari sehingga dampak yang dapat ditimbulkan adalah semakin melemahnya nilai budaya masyarakat Luwu.

Karya sastra *I Lagaligo* yang menjadi bukti intelektualitas masyarakat Luwu dahulu yang telah berada di Belanda. Sehingga untuk mempelajarinya harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Belanda. Hal ini seharusnya menjadi tamparan yang keras bagi masyarakat Luwu. Orang asing saja ingin mempelajari budaya Kerajaan Luwu, sementara masyarakat asli justru melupakan dan meninggalkannya (Rahman, 2013). Kehilangan identitas budaya Luwu yang mendera generasi mudanya selain karena arus globalisasi yang begitu kuat juga karena tak adanya

“*counter*” dilakukan terhadap budaya asing tersebut. Bukankah penjajahan baru akan terjadi jika yang dijajah rapuh secara internal. Bila generasi muda Luwu memahami secara mendalam ajaran *To Ciung Maccae Ri Luwu*, budaya asing tak akan dengan mudah merasuki setiap generasi muda Luwu. Hal tersebut ditandai dengan lunturnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan, kini hanya sebatas pengetahuan awam, bahkan ironisnya nilai-nilai budaya dapat terlupakan.

Maka dari itu, menemukan kembali identitas budaya Luwu menjadi suatu yang “wajib” dilakukan bukan hanya generasi muda, namun semua elemen masyarakat Luwu termasuk pemerintahan. Berdasarkan keadaan tersebut permasalahan ini menjadi menarik, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan memahami dalam permasalahan ini dan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “Makna Budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik bermula dari interaksionisme simbolik yang digagas oleh sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis yaitu aliran Chicago yang diprakarsai oleh Helbert Blumer, aliran Iowa yang diprakarsai oleh Manford Kuhn, dan aliran Indiana yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker. Herbert Mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan kejadian.

Pemaknaan diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan pihak lain yakni dalam konteks komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal atau *self-talk* atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia untuk mengeangkan *sense of self* dan untuk untuk mengetahui sejauh mana pihak pengelola keuangan daerah memaknai dan menerapkan budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu*.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*society*) dimana individu tersebut menetap. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Diri (*self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Laksmi (2017:125) mengatakan dalam interaksi

manusia dengan menggunakan simbol, manusia menginterpretasi situasi dengan pikiran (*mind*).

Jadi, Teori ini memberikan pandangan yang menonjolkan mengenai perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang sangat luas dan bervariasi. Teori ini dikembangkan dengan baik, mulai dari peranan diri dan kemudian berkembang pada penelitian mengenai diri dalam masyarakat (Ahmadi, 2008:313). Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu. Interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Sedangkan konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial.

2. Budaya To Ciung Maccae ri Luwu

Awal Berdirinya Kedatuan Luwu Berdasarkan kitab *Lagaligo*, Kedatuan Luwu diperkirakan muncul sekitar abad X Masehi (pendapat lain mengatakan abad VI Masehi). Masa pemerintahan *La Toge' Langi' (Batara Guru)* yang dianggap manusia pertama dalam kepercayaan masyarakat Luwu (Bugis Kuno) (Nurhasanah, 2017). Dengan diturunkannya *Batara Guru*, peradaban masyarakatnya khususnya di Sulawesi Selatan mulai berkembang dan menjadi *stereotype* bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. Selain itu, beberapa pendapat termasuk ilmuwan asing Belanda B.F Matthes tahun 1880 juga sepakat mengatakan bahwa Luwu (*ware'*) merupakan pusat peradaban Bugis dan termasuk merupakan sumber bahasa bugis. Kedatuan Luwu yang berdiri berabad-abad lalu, sejak periode awal munculnya telah berperan penting dalam membangun tatanan masyarakat di berbagai wilayah.

Wilayah-wilayah tersebut utamanya di Sulawesi Selatan bahkan kerap menghubungkan keturunan (raja-rajanya) atau keberadaan kerajaannya dengan penguasa-penguasa di Luwu seperti *Batara Guru*, *Batara Lattu'*, *Sawerigading* atau *La Galigo* bahkan hingga *Patotoe*. Gorontalo disebelah utara, Selayar disebelah selatan, Buton disebelah timur dan Mandar disebelah barat serta seluruh Sulawesi bahkan juga berkaitan dengan beberapa daerah semenanjung Melayu merupakan bagian terkecil dari persebaran pengaruh Luwu dimasa lampau. Dari kronik-kronik yang tersebar diberbagai daerah ini, kedudukan Luwu sebagai sebuah wilayah yang sangat penting dan berpengaruh bagi pertumbuhan kerajaan yang bersangkutan sangat nampak.

Sejarah dan kebudayaan Luwu memang tidak lepas dari karya terbesar yaitu *Sure' Galigo*. Selain itu, sumber tertulis lainnya tentang Luwu juga berasal dari kitab *Nagarakertagama* karya *Empu Prapanca* (1365 M) dari Kerajaan Majapahit. Jika silsilah keturunan mereka ditelusuri, maka akan bermuara di Luwu. Silsilah mereka akan sampai pada *Batara Guru*, *Batara Lattu'*, *Sawerigading* atau *La Galigo* bahkan

hingga *Patotoe*. Keterangan tersebut diatas menunjukkan bahwa Luwu merupakan sumber tumbuh dan berkembangnya kerajaan- kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi sekaligus memperlihatkan pengaruh politiknya yang cukup luas.

Dalam sejarah digambarkan bahwa sebelum *Batara Guru* diturunkan di bumi, situasi masyarakat Bugis Kuno hidup dalam ketidakteraturan, mereka saling menyerang tanpa aturan yang jelas, situasi tidak aman, yang kuat memangsa yang lemah (*sianre bale*). Akibat dari ketidakteraturan ini maka masyarakat sangat merindukan kedamaian. Saat masyarakat mengalami hal tersebut, *Batara Guru* hadir membawa ajaran kebenaran yang di sampaikan kepada *To Ciung Maccae Ri Luwu* yang menyangkut nilai-nilai seperti *Adele'* (adil), *Lempu'* (jujur) dan *Getteng* (teguh).

Ajaran tersebut sangat didukung oleh situasi sehingga membuat ajaran dan segala kebijakan pada pemerintahan *Batara Guru* sangat efektif di masyarakat (Rahman, 2013). Sosok *Batara Guru* digambarkan oleh masyarakat amat dihormati karena disamping sebagai titisan manusia dewa, juga amat bijak dalam memerintah dan mempunyai tenaga kuat dan pemberani dalam melindungi penduduk dan hal ini yang diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun kepada pemimpin masyarakat Bugis termasuk kepada *To Ciung Maccae Ri Luwu* yang dituangkan dalam simbol *pedang, emas, payung, kerajaan dan perisai*.

Paseng merupakan sebagian nasehat yang diucapkan *To Ciung Maccae Ri Luwu* (penasehat Datu Luwu, yang memiliki pengetahuan luas, utamanya dalam hal pemerintahan), sekitar abad ke 15, kepada *La Manussa To Akkaranggeng*, calon Datu Soppeng Sonrongpole sebelum menduduki tahta kerajaan di Soppeng, La Manussa diperintahkan oleh ayahnya untuk berguru pada *To Ciung Maccae Ri Luwu* mengenai ilmu dalam kepemimpinan (pemerintahan).

Dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum La Manussa To Akkaranggeng (La Baso) dinobatkan menjadi Datu Soppeng, ia meminta waktu untuk pergi belajar konsep ketatanegaraan kepada *To Ciung Maccae ri Luwu* pada Abad XVI. Yang dimaksud dengan *To Ciung Maccae ri Luwu* yaitu La Menggu To Mennang. Pada masa pemerintahannya, beliau di bantu oleh La Menggu To mennang yang memangku jabatan sebagai Makkadangnge *Tana ri Ware'* (Opu Patunru). La Menggu To mennang inilah yang mengajukan usul kepada *Pajung* atau Datu agar dilakukan perubahan pada struktur *Pakkatenni Ade'*.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menambah kesempurnaan *Pabbate'-bate'* (aparatus). Dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Luwu sejak *Pajung* atau *Datu* Luwu sampai *Pajung* atau *Datu* terakhir (Andi Jemma) mengalami beberapa kali perubahan yang substansial. Perubahan ini terjadi pertama kali periode We Tenri Rawe, *Pajung* atau *Datu* XVI.

Pada masa datu Tenri Rawe (1581-1611) dikenal seorang negarawan dan cendekiawan yang banyak memberikan perhatian terhadap kondisi kedatuan. Dia bernama *To Ciung*. *To Ciung* banyak memberikan ide-ide atau buah pikiran atau pesan-pesan kepada kedatuan (pemerintahan) yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kerajaan sehingga kedatuan terhindar dari kehancuran (Syukur, 2014:2).

Berdasarkan buah pikiran dan pesan-pesan *To Ciung* maka lahirlah hukum dasar pemerintahan kedatuan Luwu yang berpihak kepada rakyat. Menurut *To Ciung* agar kerajaan dapat bertahan dan hidup terus maka kedatuan harus pandai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah menjadi kenyataan. Ide-ide dan pemikiran *To Ciung* sangat membantu pemerintahan pada Zaman Datu Tenri Rawe, karena itulah *To ciung* mendapat gelar "*To Accana Luwu*" (Cendekiawan Luwu).

La Menggu To Mennang telah melakukan penyempurnaan *Pabbatebate* (aparatus), oleh sebab itu La Menggu To Mennang diberi gelar penghormatan oleh Pajung (Datu) Luwu sebagai *To Maccae ri Luwu*. Penghargaan ini di berikan sebagai penghormatan atas keahlian yang dimiliki dalam ketatanegaraan. Kemampuan La Menggu To Mennang sebagai seorang ahli ketatanegaraan ini memang telah memberikan warna lain bagi Kerajaan Luwu. Jasanya dalam membangun konsep ketatanegaraan di Kerajaan Luwu dipandang sangat bermanfaat, bukan hanya di Kerajaan Luwu, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain, utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat ketika seseorang bangsawan bernama La Baso To Akkarangeng menanggukuhkan pengangkatannya sebagai Datu di daerah Soppeng sebelum datang di Luwu untuk belajar kepada *To Maccae ri Luwu*. Setelah kembali dari Luwu menemui *To Maccae ri Luwu* barulah beliau bersedia dinobatkan sebagai Datu Soppeng Sonrongpole, hal ini termuat dalam *Lontara'* (Nurhasanah, 2017).

Apa yang diungkapkan *To Ciung* tersebut, merupakan unsur penting yang harus dipegang oleh seorang pemimpin (raja) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan secara keseluruhan, *To Ciung* melihat bahwa kebaikan sebuah negeri juga harus didukung oleh seluruh alat negara dalam lingkup pemerintahan. Sebab selain seorang pemimpin (raja), para alat negara (aparatus pemerintahan) juga memiliki peran penting dalam membangun sebuah negara menjadi lebih baik. Apa yang diucapkan oleh *To Ciung Maccae ri Luwu* kepada La Manussa To Akkarangeng, seperti yang termaktub di awal tulisan ini, dalam realitas sosial politik masyarakat Sulawesi Selatan telah memberikan sedikit gambaran betapa dialektika dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa lalu. Nilai-nilai yang menjadi landasan dan panutan sebagai bentuk warisan nilai dari sejarah Kerajaan Luwu (*To Ciung Maccae ri Luwu*). Adapun nilai-nilai yang di maksud adalah *Adele'* (adil), *Lempu'* (jujur) dan *Getteng* (Teguh).

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Halim, 2006). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rulyanti, 2017:326).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Robert, 2017:135). Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan daerahnya (Sari, 2016:3).

4. Budaya *To Ciung Maccae ri Luwu* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Setiap daerah memiliki adat istiadat dan nilai budaya tersendiri, Nilai budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip dan bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai budaya relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai budaya dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah nilai *To Ciung Maccae Ri Luwu* yang ajarannya antara lain yaitu *adele'* (adil), *lempu'* (jujur) dan *getteng* (teguh).

Penyelenggaraan pemerintahan (Pengelolaan Keuangan Daerah) penerapan nilai *To Ciung Maccae Ri Luwu* harus mampu ditunjukkan oleh para pejabat berdasarkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh daerah. Pandangan tersebut bahwa dalam pemerintahan masih merupakan isu yang sangat vital, mengingat munculnya berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan cenderung diakibatkan dari kebobrokan dan rendahnya penerapan nilai-nilai seperti *adele'* (adil), *lempu'* (jujur), *getteng* (teguh).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Meleong (1996:106) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif diperlukan informan, antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Adapun lokasi penelitian ini adalah di badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas.

Dengan teknik "*observatory participant*", etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Istilah Etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi yang kemudian diartikan sebagai deskripsi tentang bangsa-bangsa berasal dari kata *ethnos* dan *graphein*. *Ethnos* berarti bangsa atau suku bangsa, sedangkan *graphein* adalah tulisan atau uraian. Roger (1989) mendefinisikannya sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Artinya, dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan seorang *etnografer* (peneliti etnografi) juga menganalisis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama.

Secara garis besar prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian yang mengadopsi pendekatan etnografis yaitu sebagai berikut:

1. Memilih situs penelitian

Hal terpenting pertama yang harus dilakukan oleh seorang etnografer adalah menentukan lingkup studi.

2. Menetapkan Informan
Informan yang baik adalah informan yang terlibat langsung serta mengetahui secara baik tentang hal yang akan dikaji. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap dapat bercerita secara mudah, serta paham terhadap informasi yang dibutuhkan.
3. Melakukan Wawancara terhadap Informan
Ada beberapa etika yang harus dipatuhi pewawancara, antara lain mempertimbangkan kepentingan informan terlebih dahulu, menyampaikan tujuan penelitian, melindungi privasi informan, dan jangan mengeksploitasi informan.
4. Membuat Catatan Etnografis
Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak dan benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari.
5. Mengajukan Pertanyaan Deskriptif
Pertanyaan Deskriptif merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban penjelas.
6. Melakukan Analisis Wawancara Etnografis
Analisis wawancara etnografis yaitu menggarisbawahi semua istilah asli informan yang telah diperoleh untuk mempertinggi peranannya dalam mengetahui tentang objek budaya yang diteliti. Analisis ini dikaitkan dengan symbol dan makna yang disampaikan informan.
7. Membuat analisis Domain
Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang dinyatakan informan. Istilah tersebut seharusnya memiliki hubungan semantic yang jelas
8. Mengajukan Pertanyaan Struktural
Pertanyaan structural merupakan pertanyaan yang disesuaikan dengan informan. Pertanyaan structural bertujuan mengetahui bagaimana informan mengorganisir pengetahuan mereka
9. Melakukan Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran penelitian. Analisis taksonomi dilakukan untuk membuat kategori dari symbol-simbol budaya yang ada pada kebudayaan yang diteliti.
10. Menulis Etnografi
Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari temuannya yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis domain, maka nilai *to ciung maccae ri luwu* meliputi nilai *adele* (adil), *lempu* (jujur), *getteng* (keteguhan).

1. Adele (Adil) Sebuah Warisan Yang Harus Tetap Dijaga

Dalam pengelolaan keuangan daerah diuntut adanya sebuah aspek perilaku yang tercermin dalam setiap individu yang berbeda, dalam hal ini juga dijelaskan dalam budaya yang saat ini etnografer akan jelaskan. Budaya yang diajarkan *to ciung maccae ri luwu* dalam kerajaan Luwu seperti *Adele* [keadilan]. *Adele* [adil] berasal dari bahasa arab *adil* yang berarti di tengah. Adil berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan meletakkan pada sebuah prinsip dalam tujuan suatu negara. Menjadi sebuah tugas penyelenggara negara untuk menciptakan sebuah keadilan. Tujuan bernegara adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, hal tersebut sangat jelas tertuang dalam sila ke-5 Pancasila. Pesan yang terkandung dalam Pancasila tersebut hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara pemerintah bahwa tugas utama sebuah penyelenggara adalah menciptakan keadilan.

Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsep raja-raja Luwu sejak dahulu yang bersandar pada filosofi yang di kemukakan oleh *I Sahe Makkunrai* yaitu:

“Aro adele agaukeng de’na mappile pile na pappada ngasangi tauwede. Siwennimi adele mapparenta datu-e padami patappulo wennisempajangne”. (Rahman,2013)

[Adil itu adalah perilaku yang tidak memilih-milih atau membedakan dan menyamaratakan semua orang. Pemerintah yang berbuat adil dalam semalam sama halnya empat puluh malam mendirikan sembahyang]

Dari konsep tersebut *adele* [adil] yang di pahami penulis berdasarkan filosofi Kerajaan Luwu, *adele* [adil] dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti yang di ungkapkan informan pada saat etnografer tiba di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, etnografer memasuki ruangan BPKD tidak lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam “*assalamualaikum*” salah seorang di antara tiga orang pegawai perempuan mengucapkan salam “*walaikumsalam* masuk ki dek” lalu etnografer di persilahkan untuk masuk dan pegawai tersebut mengatakan kepada etnografer “bapak kabid belum datang dek, duduk meki dulu” sambil tersenyum mengarah

etnografer dan memegang beberapa lembar kertas ditangannya. Etnografer duduk sambil menunggu bapak kepala bidang akuntansi tiba di tempat. Pada saat etnografer menunggu bapak kabid akuntansi tiba, etnografer melihat sekeliling ruangan BPKD Kabupaten Luwu, ada dua orang pegawai yang sedang melaksanakan shalat sunnah duha, setelah itu datanglah seorang pegawai menghampiri etnografer, dari hasil percakapan etnografer dengan informan mengungkapkan bahwa:

“adil itu tidak di beda-bedakan orang [adil itu tidak membeda-bedakan siapapun].”

Dalam percakapan yang berlangsung secara terus terang informan mengungkapkan bahwa informan tidak begitu paham makna yang terkandung, hanya saja informan mengungkapkan berdasarkan arti kata dari adil itu sendiri. Hal tersebut terlihat ketika etnografer menanyakan tentang keberadaan *To Ciung Maccae Ri Luwu*, informan mengatakan bahwa informan hanya sekedar tau tetapi tidak memahami maknanya. Hal serupa juga di ungkapkan informan pada saat melakukan percakapan dengan etnografer. Pada saat etnografer bergegas untuk melaksanakan shalat duhur bersama salah satu staf, dalam perjalanan menuju mushollah kantor, etnografer mencoba membuka percakapan dengan staf tersebut untuk mencari informasi dan menelusuri sejauh mana pemahaman pihak pengelola keuangan daerah tentang budaya *to ciung maccae ri luwu*, informan mengungkapkan:

“yah kalau adil itu tidak memilih-milih, *dikasi* sama rata semua orang”.

Lebih lanjut juga di ungkapkan oleh informan dari percakapan dengan etnografer yang mengungkapkan pemahamannya tentang nilai *adele* [adil] yang informan ketahui hanya karena informan sering mendengar dari percakapan orang tuannya tentang budaya kerajaan luwu, tetapi informan tidak begitu paham dengan nilai *adele* [adil] tersebut, informan mengungkapkan pemahamannya mengenai nilai *adele* [adil] hanya berdasarkan pemahaman informan berdasarkan arti kata adil secara harfiah, informan mengungkapkan bahwa “*adil itu seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya*”. Dari percakapan yang berlangsung antara etnografer dengan beberapa informan, etnografer menyimpulkan bahwa terdapat beberapa informan yang tidak dapat memaknai konsep *adele* [adil] berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya, bertitik tolak dari informan yang tidak dapat memaknai konsep *adele* [adil] terdapat pula informan yang memahami atau dengan kata lain cukup paham dengan konsep tersebut. Hal tersebut di tandai etnografer ketika melakukan percakapan dengan informan yang mengungkapkan bahwa:

“nilai lokal *adele* itu adalah nilai yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap penyelenggara pemerintahan secara luas,

bukan hanya sekedar tau arti dari kata adil itu sendiri, apalagi kita berada pada suatu daerah yang tentunya mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang merupakan nilai luhur yang menjadi warisan nenek moyang ta di daerah luwu ini, jadi kita sebagai generasi penerus wajib terus menjaga dan tetap bersandar pada nilai budaya yang ada di daerah kita ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar tau arti dari kata adil”.

Dari hasil percakapan dapat dilihat bahwa informan sebelumnya telah memahami akan adanya nilai *adele* (adil) di Kerajaan Luwu, hal tersebut di lihat dari penjelasannya mengenai nilai *adele* (adil) yang merupakan sebuah warisan dari nenek moyang yang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa nilai *adele* (adil) merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami terutama dalam bidang pemerintahan.

Pemahaman konsep *adele* (adil) cukup di pahami oleh informan karena dalam percakapan yang berlangsung dengan informan, informan mengatakan bahwa informan sedang mengkaji lebih dalam tentang budaya-budaya di kerajaan yang ada di tanah Luwu, dalam hal ini informan sedang menyusun tesis dengan tema budaya yang sama dengan penelitian yang sedang etnografer teliti.

Lebih lanjut juga di jelaskan oleh informan lain, saat etnografer melihat informan sedang duduk di dalam ruangnya dan memegang teleponnya, terlihat tidak banyak pekerjaan jadi etnografer menghampiri informan tersebut lalu menyempatkan untuk bercerita kepada informan untuk menggali informasi yang etnografer butuhkan. Dalam percakapan tersebut informan mengungkapkan bahwa:

“*adele* itu pemberian hak berdasarkan kinerja yang telah dilakukan dan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan pegawai.”

Keadilan adalah suatu bentuk tindakan seseorang yang tidak membedakan, semuanya harus disamaratakan dan memberikan hak berdasarkan kinerja yang telah dilakukan. Berdasarkan percakapan dari beberapa informan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *adele* [adil] sudah di pahami sebagian besar pihak pengelola keuangan di kantor BPKD Kabupaten Luwu walaupun demikian, masih terdapat beberapa informan yang hanya mengetahui konsep *adele* (adil) secara harfiah atau arti kata saja bukan secara makna yang terkandung di dalam nilai *adele* (adil) tersebut.

2. Lempu (Jujur) Merupakan Suatu Tindakan Yang Berasal Dari Dalam Hati Nurani

Lempu [jujur] diartikan berkata ataupun memberikan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau

kenyataan yang benar-benar ada. Sikap jujur adalah sebuah sikap yang berupaya mencocokkan ataupun menyesuaikan antara informasi dengan keadaan atau fenomena. Sikap jujur merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani seseorang dan bukan merupakan hasil pemikiran yang keluar dari diri seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan *lempu* [jujur] dalam konteks budaya yang berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh *To Maccae ri Luwu*, dari percakapan dengan *La Manasse To Akkarangeng* (La Baso), yaitu:

“*Aga Lamperi Sunge’Nene?’*, ‘*Naia Lamperi Sunge’, Lempue. Eppa Gau’na Tomalempue. Seunai, Risalaie Na’dampeng. Maduanna, Riparennu Angie Tennapajekkoi. Bettuanna Risanresie Tennapabell.Eang. Matellunna Temmangoainngi Taniae Anunna. Maeppana, Tesesse’deceng Rekko Alena Podecengngi*”. (Rahman, 2013).

[Adapun yang memperpanjang umur ialah kejujuran. Empat jenisnya orang jujur. Pertama, orang yang bersalah padanya tapi ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak mencurangi. Artinya ia dijadikan saudara dan tidak mengkhianati. Ketiga, tidak serakah terhadap apa yang bukan miliknya. Keempat, tidak mencari kebaikan jika hanya ia yang akan menikmatinya.]

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh beberapa informan dari hasil percakapan yang berlangsung dengan etnografer,

“Kalau *lempu* [jujur] itu, tunggu dulu *ku*[saya] ingat- ingat *ii*, kalau tidak salah *ka* jujur *kayaknya*[sepertinya] kalau *ndk*[tidak] salah”.

Lebih lanjut dijelaskan dari percakapan etnografer dengan informan,

“sebenarnya nilai *lempu* [jujur] itu baru saya dengar waktu kamu bilang sama saya, tentang nilai *lempu* dalam budaya luwu itu saya belum cukup paham, saya hanya tau arti dari jujur itu mengungkapkan suatu hal sesuai dengan yang benar-benar terjadi”.

Berdasarkan percakapan dengan beberapa informan, sama halnya dengan konsep *adele* yang telah di bahas sebelumnya, beberapa informan ketika etnografer menanyakan tentang nilai *lempu*, beberapa informan ada yang hanya pernah mendengarnya saja dan ada juga informan yang sudah memahami tentang nilai *lempu* secara makna yang terkandung didalamnya seperti yang diungkapkan oleh informan mengungkapkan bahwa:

“orang tua saya pernah menyampaikan sebuah pesan kepada saya, dia mengatakan *mallempuko nak, aja’na mu maccikko-*

cikko [jujur lah anakku, jangan mengambil yang bukan hakmu].

[Yang di maksud dengan jujur itu berdasarkan pesan dari orang tua saya bahwa jujur itu tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, selalu berkata yang benar atau dengan kata lain tidak berbohong]

Berdasarkan percakapan dengan beberapa informan dapat di simpulkan bahwa nilai *lempu* [jujur] sudah di pahami oleh pihak penyelenggara di badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu, baik pemahaman secara harfiah atau arti kata maupun pemahaman secara makna yang terkandung dalam nilai *lempu* [jujur].

3. Getteng (Teguh) Wujud Suatu Pendirian

Selanjutnya, pemahaman nilai *getteng* [keteguhan], adapun yang di maksud dengan *getting* [teguh] dalam konteks nilai budaya yang berasal dari kerajaan luwu sesuai yang diajarkan *to ciung maccae ri luwu* yaitu tidak mengingkari janji, tidak melangkahi persetujuan, tidak mengurangi barang jadi, dan ketika mengadili tidak berhenti sebelum rampung.

Getteng atau keteguhan merupakan suatu hal yang tidak berubah hati, tetap memegang teguh apa yang sudah menjadi pendiriannya. Yang di maksud teguh pendiriannya jika memiliki sebuah pendapat tidak mengubah pendapat tersebut. Teguh dalam pendirian merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, hanya saja dalam era seperti sekarang ini orang yang memiliki sifat demikian itu sangat kurang bahkan hampir tidak ada lagi.

Adapun yang dimaksud dengan *getteng* [teguh] dalam konteks nilai budaya yang berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh *to ciung maccae ri luwu* dari percakapannya dengan *la manasse to akkarangeng* (la baso) yaitu:

“*aga pasawe tau, nene, pa'biuja olokolo?*”

“*iana ritu gettenge. Eppa gau' na gettenge. Seuani, tessalaie janci enrennge tessoasi ulu ada. Maduanna, tellukkae anu pura enrennge teppinrae assitureseng. Matellunna, narekko ma'bicarai, purapi napajaiwi*”. (Rezki, 2013).

[itulah keteguhan hati, empat jenisnya keteguhan hati. Pertama, tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi persetujuan. Kedua, tidak mengurangi barang jadi serta tidak mengubah kesepakatan. Ketiga, jika ia mengadili nanti telah putus baru ia berhenti].

Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai *getteng* (keteguhan) sangat di butuhkan oleh setiap manusia, walaupun pada kenyataan sekarang ini masih banyak yang belum memiliki sifat tersebut. Hal ini juga di ungkapkan dalam percakapan yang berlangsung dengan informan yang

mengungkapkan bahwa:

“teguh sama saja dengan ketegasan, teguh dalam pendirian, apapun tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik berdasarkan tanggungjawab yang sudah diberikan dan konsisten pada aturan yang diberikan seperti contohnya datang tepat waktu dikantor dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas yang diberikan.”

Lebih lanjut diungkapkan oleh informan mengungkapkan pemahamannya mengenai nilai *getteng* [teguh], informan mengungkapkan bahwa “*getteng* itu di artikan konsisten dan punya satu pendirian yang kuat”. Berdasarkan percakapan tersebut menyimpulkan bahwa *getteng* [keteguhan] adalah sikap atau perilaku seseorang yang tetap setia terhadap pendiriannya dan konsisten terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari percakapan tersebut diatas, etnografer menganggap bahwa informan cukup paham dengan nilai *getteng* [teguh] ini, dalam artian informan mampu memaknai secara sesungguhnya berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya dan berdasarkan konsep yang diajarkan dalam kerajaan Luwu.

Oleh karena itu nilai *lempu* (teguh) selain sebagai bentuk warisan dari Kerajaan Luwu, jug sangat relevan dengan ajaran agama yang mengajarkan suatu nilai kebaikan, sehingga dapat dijadikan sebuah landasan bertindak dan bertingkah laku terutama dalam mengelola keuangan daerah serta masih bersandar pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur dari kerajaan Luwu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al- Imran ayat 147 “*tidak ada do’a mereka selain ucapan, ya tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir*”. (QS.Al-Imran ayat 147). Ayat tersebut menjelaskan tentang sebuah pendirian yang harus ditetapkan, seperti dalam halnya kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah harus tetap konsisten dan patuh terhadap peraturan yang ada.

4. Penerapan Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu

Penerapan sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang mempraktekkan sebuah teori yang telah diketahui untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mencapai suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau organisasi yang telah di rencanakan sebelumnya. Dari hasil penelitian etnografer suatu pemahaman pihak pengelola keuangan daerah terhadap budaya yang diajarkan oleh *to ciung maccae ri luwu* dalam hal ini nilai *adele* [adil], *lempu* [jujur] dan *getteng* [keteguhan] dan bagaimana penerapannya dalam mengelola keuangan, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan dari hasil percakapan yang terjadi selama etnografer berada dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah atau dengan kata

lain selama etnografer membaur didalam pengelolaan keuangan daerah, informan mengungkapkan bahwa:

“seperti dalam pencatatan laporan keuangan harus memasukkan angka-angka yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa agar terlihat baik itu laporan yang dibuat.”

Penjelasan informan tersebut diatas, menjelaskan tentang bagaimana konsep keadilan itu diterapkan dalam mengelolah keuangan seperti dalam pencatatan laporan keuangan yang sesuai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Informan lain yang mengungkapkan “*pemberian gaji pegawai harus sesuai dengan kinerjanya dan sesuai dengan tupoksinya*”. Hal tersebut menjelaskan dan cukup membuktikan jika konsep *adele* [keadilan] yang diajarkan oleh *to ciung maccae ri luwu* sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.

Selanjutnya, nilai *lempu* [kejujuran] di sini sebenarnya dari hasil penelitian yang didapatkan oleh etnografer, etnografer belum melihat penerapan nilai *lempu* dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena sebenarnya kejujuran berasal dari tiap individu masing-masing. Kejujuran tersebut pasti dilakukan tanpa terlihat dan apabila individu tersebut melakukan tindakan atau perilaku tidak jujur, individu tersebut pasti akan berusaha menyembunyikan perilaku atau tindakannya tersebut. Meskipun tidak terlihat penerapan nilai *lempu*, diungkapkan oleh informan bahwa:

“nilai budaya dari kerjaan luwu itu sudah sepantasnya untuk Diterapkan oleh penyelenggaraan pemerintah seperti kami ini, seperti dalam hal perencanaan keuangan, kami harus berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak jangan sampai dalam proses penyelenggaraan terdapat masalah. Dalam konsep keadilan, kejujuran maupun konsistensi Alhamdulillah secara tidak sadar kami telah menerapkannya dalam pekerjaan kami.”

Selanjutnya, penerapan nilai *getteng* [konsisten] juga diungkapkan oleh informan lain bahwa:

“Iya dek alhamdulillah sudah di terapkan dek. “sudah tiga tahun berturut-turut ini alhamdulillah hasil audit dari badan pemeriksa keuangan sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kantor kami.”

Lebih jelas diungkapkan oleh informan dalam percakapan yang terjadi selama ethnografer berada di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Luwu, informan mengungkapkan bahwa:

“Dalam Badan pengelola keuangan daerah ini sudah ada bagian atau divisi yang terkhusus berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan seperti saya yang memegang bagian itu. Adapun penyusunan LKPD sudah kami susun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang nantinya laporan

keuangan itu akan diperiksa oleh BPK untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan yang sudah kami buat.”

Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa pihak pengelola keuangan daerah kabupaten Luwu sudah secara konsisten menerapkan standar akuntansi yang berlaku, juga terlihat dari hasil audit yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut menjelaskan bahwa kabupaten Luwu sendiri sudah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 hingga 2017. Opini tersebut diberikan karena aparat pemerintahan dalam mengelola dan menyajikan keuangan sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hal tersebut juga karena aparat pemerintah menjunjung tinggi nilai budaya *to ciung maccae ri luwu* dalam melakukan pekerjaannya. Nilai *Adele, lempu, getteng* diterapkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga apa yang teralisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Hal lain juga menjelaskan tentang konsiten para pegawai yang datang tepat waktu di kantor badan pengeolaa keuanga daerah kabupaten Luwu. Maka dari hal tersebut, ethnografer menyimpulkan bahwa para pihak pengelola keuangan daerah kabupaten Luwu sudah konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kinerja dan perilaku pihak pengelola keuangan daerah sebagai pihak yang menaati aturan yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh etnografer, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu sudah memaknai secara tidak langsung konsep budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu*. Hal tersebut karena pihak pengelola keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu memiliki kesadaran yang begitu besar terhadap kebudayaan Luwu, mereka sadar bahwa sebagai masyarakat Luwu wajib hukumnya mengetahui dan memahami secara mendalam budaya dari kerajaan Luwu. Kesadaran pihak pengelola tersebut berdasarkan hasil penelitian yakni budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* membuktikan bahwa pihak pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu sudah memahami dan menerapkan budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dalam hal ini nilai *adele, lempu, getting* dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pihak pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya selalu mentaati peraturan yang ada, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dan memiliki rasa tanggung jawab

serta kesadaran dalam melaksanakan program kegiatan.

2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada, demi perbaikan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak pengelola BPKD Kabupaten Luwu diharapkan lebih meningkatkan pemahamannya terhadap budaya di kerajaan Luwu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui arti dari budaya tersebut tetapi lebih memahami secara mendalam makna yang terkandung didalam budaya tersebut.
- b. Budaya *To Ciung Maccae Ri Luwu* dalam perilaku pihak pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan analisa budaya secara mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga penerapan budaya bisa dikaji lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S Rustan Dan Hafied Cangara. 2011. Perilaku Komunikasi Orang Bugis Dari Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 1(1): 91-105.
- Ahmadi, D. 2008. Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Mediator*. 9(2): 301-316.
- Ima, Andi Kesuma. 2015. Legacy Tanah Luwu. *Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan* (Luwu: Pemda Luwu Timur), Nm. 251.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Mallonjo, Sioja Daeng. 2008. *Kedatuan Luwu (Catatan Tentang Sawerigading, System Pemerintahan Dan Masuknya Islam*. Palopo. Pustaka Sawerigading.
- Meleong, Lexy J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moch, Yayath Pangerang. 2011. *Pemerhati Kebudayaan*.
- Rulyanti, Dina, Raden Andi Sulars dan Yosefa Sayekti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. 11(3): 323 – 335.
- Sari, G. N, Paulu Kindangen dan Tri Oldy Rotinsulu. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. 1-17.
- Siregar, N.S.S. 2011. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma*. 4(4): 100-110.

Yatminiwati. 2018. Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak.E- ISSN. 2598-6074. P. ISSN. 2598-2885. 2(1): 48-55.*